

ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA KELURAHAN DI KELURAHAN BANYUNING KECAMATAN BULELENG

Oleh:

Putu Voni Sudartini, NIM 2257023015

Jurusan Ekonomi dan Akuntansi

ABSTRAK

Kelurahan merupakan unit pemerintah terkecil di bawah kecamatan yang berada di kota atau kabupaten. Kelurahan memiliki tanggungjawab untuk menyampaikan informasi mengenai pendanaan, penyelenggaraan dan sebagainya. Terdapat 17 kelurahan yang ada di kecamatan Buleleng salah satunya adalah Kelurahan Banyuning. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui (1) Penerapan transparansi dalam pengelolaan dana kelurahan di kelurahan Banyuning, (2) Penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan dana kelurahan di kelurahan Banyuning, (3) Kelemahan dalam transparansi dan akuntabilitas di kelurahan Banyuning, (4) Cara mengantisipasi adanya kelemahan dalam transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini menggunakan jenis data deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian adalah sekretaris lurah, pembantu bendahara lurah, kasi pelayanan, dan warga kelurahan Banyuning. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Transparansi di kelurahan Banyuning masih kurang transparan dikarenakan masih belum adanya penyampaian penggunaan dana kepada masyarakat serta saat melaksanakan musyawarah dan musrembang masih belum ada kehadiran masyarakat. 2) Akuntabilitas di kelurahan Banyuning sudah akuntabel karena dokumen serta laporan yang berkaitan dengan keuangan sudah lengkap dan sudah dilaporkan kepada atasan yaitu kecamatan. 3) Beberapa kelemahan yang ditemukan berdasarkan transparansi dan akuntabilitas yaitu penyampaian informasi yang kurang luas dan jelas, kurang terbukanya mengenai penggunaan anggaran kepada masyarakat, interaksi pemerintah kelurahan dan masyarakat perlu ditingkatkan lagi, pekerjaan yang dilakukan harus sesuai dengan SOP. (4) Berikut merupakan beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi adanya kelemahan dalam transparansi dan akuntabilitas yaitu memberitahukan informasi secara berkala, melakukan sosialisasi, publikasi laporan keuangan, memenuhi tanggungjawab untuk melakukan pelaporan, dan bekerja sesuai SOP.

Kata Kunci : Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Kelurahan

**ANALYSIS OF TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY OF THE
MANAGEMENT OF FUNDS IN BANYUNING SUB-DISTRICT BULELENG
DISTRICT**

By:

Putu Voni Sudartini, NIM 2257023015

Department of Economics and Accounting

ABSTRACT

Sub-district is the smallest government unit under the district in a city or regency. Sub-district has the responsibility to submit information about funding, organization and so on.. There are 17 sub-districts in Buleleng district, one of which is Banyuning district. This research aims to find out (1) The application of transparency in the management of sub-district funds in Banyuning sub-district, (2) The application of accountability in the management of sub-district funds in Banyuning sub-district, (3) Weaknesses in transparency and accountability in Banyuning sub-district, (4) How to anticipate weaknesses in transparency and accountability. This study uses descriptive data type with a qualitative approach techniques through observation, interviews, and documentation. The research subjects were the sub-district secretary, the assistant treasurer of the sub-district, the service section, and the residents of Banyuning Sub-district. The results of this study show that: 1) Transparency in Banyuning Sub-district is still lacking in transparency because there has been no communication regarding the use of funds to the community and when carrying out deliberations and musrembang there is still no community presence. 2) Accountability in Banyuning Sub-district is accountable because documents and reports related to finance are complete and have been reported to superiors, namely the district. 3) Some of the weaknesses found based on transparency and accountability are the delivery of information that is less extensive and clear, less openness about the use of the budget to the community, the interaction between the sub-district government and the community needs to be improved, the work carried out must be in accordance with the SOP. (4) The following are several things that can be done to anticipate weaknesses in transparency and accountability, namely informing information regularly, conducting socialization, publishing financial reports, fulfilling responsibilities for reporting, and working according to the SOP.

Keywords: Transparency, Accountability, Sub-district Fund Management